

Analisis Dampak Framing Berita Konflik Antara Kementerian Agama dan DPR-RI Mengenai Tambahan Quota Haji 2024

Budiman S Pirmansyah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: BudimanSPirmansyah@gmail.com

Article Information **Abstrak**

Submitted: 08
Agustus 2024
Accepted: 22
Agustus 2024
Online Publish: 22
Agustus 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak framing berita media terhadap konflik antara Kementerian Agama dan DPR-RI mengenai penambahan kuota haji pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis framing dengan mengidentifikasi bagaimana media membingkai isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media cenderung membingkai berita dengan fokus pada perdebatan politik antara Kementerian Agama dan DPR-RI, mengabaikan perspektif masyarakat yang terdampak. Pembingkai berita tersebut dapat memperluas jurang konflik di antara pemangku kepentingan dan mengeskalasi ketegangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa media perlu menyediakan liputan yang berimbang dengan melibatkan berbagai pandangan pemangku kepentingan untuk menjaga netralitas dan objektivitas pemberitaan.

Kata kunci: Pembingkai Berita, Konflik, Kementerian Agama, DPR-RI, Quota Haji

Abstract

This study aims to analyze the impact of media news framing on the conflict between the Ministry of Religion and the House of Representatives regarding the addition of the hajj quota in 2024. The research method used is framing analysis by identifying how the media frames the issue. The results of the study show that the media tends to frame the news by focusing on the political debate between the Ministry of Religion and the House of Representatives, ignoring the perspective of the affected community. Framing the news could widen the gap in conflict among stakeholders and escalate tensions. Therefore, this study recommends that the media need to provide balanced coverage by involving various stakeholder views to maintain the neutrality and objectivity of the news.

Keywords: News Framing, Conflict, Ministry of Religious Affairs, DPR-RI, Hajj Quota

Pendahuluan

Konflik yang sedang berlangsung antara Kementerian Agama dan Dewan Perwakilan Rakyat terkait penambahan kuota haji untuk tahun 2024 telah menarik perhatian media yang signifikan di Indonesia, dengan media memainkan peran yang sangat penting dalam membingkai isu ini dan mempengaruhi persepsi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembingkai berita oleh media terhadap eskalasi konflik tersebut. Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber yang relevan, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang berperan dalam menimbulkan dan menguatkan konflik ini (Santoso, Abdulkarim, & Maftuh, 2023).

How to Cite

Budiman S Pirmansyah/Analisis Dampak Framing Berita Konflik Antara Kementerian Agama dan DPR-RI Mengenai Tambahan Quota Haji 2024/Vol 5 No 4 (2024)

DOI

<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i4.458>

e-ISSN

2721-2246

Published by

Rifa Institute

Kecepatan penyebaran informasi melalui media digital dan tanggapan masyarakat yang cepat melalui media sosial telah menjadi katalis bagi perdebatan dan polarisasi pendapat public (Hamidah, 2023). Di tengah masyarakat yang semakin majemuk secara agama dan budaya, potensi konflik berbasis identitas keagamaan juga meningkat (Primayana & Dewi, 2021). Peran pemerintah dan elit politik dalam menangani konflik tersebut juga belum optimal, di mana politics of power seringkali menjadi pemicu eskalasi ketimbang upaya mediasi dan resolusi damai (Kusmiati & Sakova, 2021). Selain itu, kurangnya strategi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bertikai untuk membangun pemahaman bersama juga menjadi faktor penting yang menghambat penyelesaian konflik (Marlina & Indrawan, 2023). Dalam konteks ini, media berperan signifikan dalam membentuk persepsi publik melalui pemingkakan berita yang dilakukan (Nurhayati, 2023).

Pemingkakan berita dapat memperkuat atau meredam konflik, bergantung pada bagaimana media mengkonstruksi narasi dan memilih sudut pandang dalam menyajikan informasi (Isbah & Darmawan, 2021), (Samuel & Tumonglo, 2023), (Taniredja, Pradana, & Priyanto, 2021), (Sopiyan, Hidayat, Setiawati, & Hadi, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya peran media dalam memediasi konflik dan mendorong terciptanya masyarakat yang toleran.

Tulisan ini mengemukakan mengenai analisis framing berita tentang issue tambahan kuota haji yang dijual kemenag. Lebih dari lima media menyoroti dan memuat berita mengenai issue ini, dengan berbagai sorotan. Beberapa tokoh bahkan mensinyalir ada praktik jual beli dalam penggunaan Quota Haji tambahan tahun ini. Kinerja kemenag dianggap tidak adil oleh beberapa tokoh dalam pelaksanaan haji tahun ini. Sehingga dengan adanya tambahan kuota 20.000 tidak berpengaruh terhadap persoalan antrian Panjang daftar haji di Indonesia.

Lebih dari 5 media menyoroti berita ini, diantaranya Kompas, Media Indonesia, antara News, INDOsatu, Galamedia News, Detik.com. Media Kompas.com menyoroti berita dengan judul; *Kecewa Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, DPR: Desas-desusnya Dijual. Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan. Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang.*

Selain Kompas, media Indonesia juga mengangkat berita ini dengan judul; *Timwas Haji DPR Desak Penyelidikan Pengalihan Setengah Kuota Tambahan Haji Reguler 2024.*

Galamedia News mengangkat berita ini dengan judul; *Bakalan Rame Nih, Setengah Kuota Tambahan Haji Reguler di Jual ke Haji Plus Plus.*

Khazanah.republika.co.id memuat berita; *Dinilai Salahgunakan Kuota Haji oleh Anggota DPR, ini Kata Menag Yaqut.* Yaqut menegaskan tak ada penyalahgunaan dalam pemanfaatan alokasi kuota tambahan pada operasional ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi. Baca artikel detiknews, *"Ada Dugaan Jual Beli 20 Ribu Kuota Tambahan Haji, Legislator Akan Investigasi"* selengkapnya <https://20.detik.com/detikupdate/20240620-240620118/ada-dugaan-jual-beli-20-ribu-kuota-tambahan-haji-legislator-akan-investigasi>.

Tanggapan Tokoh

Dari lima media yang menyetengahkan berita mengenai tambahan kuota haji dijual, beragam tanggapan dari beberapa tokoh. Seperti yang diungkapkan oleh Ace Hasan Sadzali selaku team pengawas Haji DPR RI, yang dimuat KOMPAS. Ace menyebut bahwa; *upaya Presiden Jokowi dalam meminta tambahan kuota kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi ditujukan untuk mempercepat pemberangkatan jemaah yang telah menunggu puluhan tahun. "Presiden Jokowi memikirkan rakyat yang antre ingin berhaji, bukan untuk memfasilitasi orang berduit yang akan berhaji," ujarnya.*

Selain itu, Muhaimin Iskandar yang dimuat di Kompas.com menyebut bahwa pengalihan Quota Haji yang dilakukan Kemenag secara sepihak mencederai rasa keadilan masyarakat dan melanggar Undang-Undang.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Wachid yang dimuat di rmol.id, menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) telah melanggar kesepakatan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR terkait kuota haji tambahan. Yang tadinya disepakati dengan DPR 92% untuk haji regular dan 8% untuk haji khusus ini malah dirubah sepihak oleh kemenag jadi 50% regular dan 50% haji khusus. Kemenag juga disebut melanggar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445H/2024.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah, melalui INDOSatu.co menyinggung adanya desas-desus yang menyebutkan bahwa kuota haji dijual dengan harga tertentu. "Kami mendengar desas-desus yang sangat tidak mengenakkan bahwa kuota ini dijual dan ada pihak-pihak yang harus mengeluarkan sejumlah uang atau dolar tertentu untuk mendapatkan percepatan haji tahun ini, padahal seharusnya masih beberapa tahun lagi," ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq akan melakukan investigasi dugaan jual-beli 20 ribu kuota tambahan haji. Maman mengatakan jatah untuk jemaah yang akan berangkat haji digantikan orang yang mampu membayar lebih.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode analisis framing untuk mengidentifikasi bagaimana media membingkai pemberitaan mengenai konflik Kementerian Agama dan DPR-RI terkait penambahan kuota haji 2024. Data yang dianalisis meliputi pemberitaan dari berbagai media online terkemuka di Indonesia

Analisis

Analisis Framing

Dari berita yang dimuat di beberapa media massa online, menggambarkan bahwa ada framing yang terbentuk dari berita, terutama dari pemilihan kata, sorotan berita bahwa kementerian agama dianggap menyalah gunakan Quota Haji tambahan bahkan dijual. Selain itu kemenag ini dianggap melakukan kesalahan besar karena telah melanggar Undang-Undang. Bahkan kemenag digambarkan berlaku tidak adil dan berpihak pada orang yang berduit dalam pembagian kuota haji tambahan.

Agenda Setting

Bila ditilik dari teori agenda setting media, yaitu media memiliki kemampuan untuk memengaruhi isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Dalam kata lain, media tidak secara langsung memengaruhi bagaimana orang berpikir, tetapi media memengaruhi apa yang orang pikirkan.

Kompas misalnya, media ini dalam mengangkat berita lebih menyoroti berita mengenai penjualan Quota haji oleh kemenag. Beritanya diulan-ulang dengan narasumber yang berbeda. Ini akan berpengaruh terhadap opini public pembaca Kompas, dan akan mempengaruhi pikiran audiens pembaca Kompas, bahwa benar Kementerian agama menjual Quota haji, padahal belum ada investigasi bahkan bukti kuat yang diwawancara oleh Kompas orang yang membeli quota haji 2024.

Opini Publik

Dalam buku *Alarming Reports: Communicating Conflict in the Daily News*, Andrew Arno. Arno menyoroti bahwa media memiliki peran kunci dalam membentuk opini publik. Berita yang disajikan oleh media dapat mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap isu-isu tertentu.

Dengan adanya berita-berita mengenai tambahan Quota haji yang dijual kemenag, public menilai bahwa Menteri agama Yaqut dan anak buahnya dianggap tidak baik, diserang oleh komentar pedas pembaca Kompas atas nama Eva Indrianti, dengan Bahasa; *'menteri nye aja begajul apa lg anak buah nya'*. Selain itu ada beberapa komentar pembaca Kompas yang lain juga menganggap bahwa dengan adanya berita ini image kemenag dalam pengurusan haji ini tidak baik, Lembaga agama ini diserang netizen dianggap diskriminatif, bahkan korup.

Dampak Sosial

Opini media ini mempengaruhi perilaku public atau netizen dalam menyikapi kinerja kementerian agama dalam pengurusan haji. Pemberitaan tentang isu kuota Haji yang dijual oleh Kementerian Agama telah membawa berbagai dampak sosial yang signifikan di masyarakat Indonesia. Dari ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah dalam hal ini kemenag, pro kontra di media hingga hujatan terhadap Kemenag dan Menteri Agama. Isu ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan masalah publik. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi isu ini dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kemenag dalam menangani haji.

Kesimpulan

Analisis sosiologis dan antropologis menurut Andrew Arno dalam buku *Alarming Reports: Communicating Conflict in the Daily News* memberikan wawasan berharga dalam memahami bagaimana media melaporkan isu kuota Haji yang dijual oleh Kementerian Agama. Pemberitaan oleh berbagai media seperti Kompas, Media Indonesia, antara News, INDOsatu, Galamedia News, Detik.com, Republika dan lainnya,

Analisis Dampak Framing Berita Konflik Antara Kementerian Agama dan DPR-RI Mengenai Tambahan Quota Haji 2024

menunjukkan bagaimana media dapat membentuk opini publik, mengamplifikasi (*membesarkan*) konflik, dan membangun narasi yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat lebih kritis dalam mengonsumsi berita dan lebih bijak dalam merespons isu-isu sosial yang begitu kompleks.

BIBLIOGRAFI

- Hamidah, K. (2023). Seizing Public Digital Dominance; The Phenomenon Of Mainstream Islamic Media Digital Battle. *Mu'ashir: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 1(1), 1–12.
- Isbah, M. F., & Darmawan, A. B. (2021). Perspektif Ilmu-Ilmu Sosial di Era Digital: Disrupsi, Emansipasi, dan Rekognisi. *Perspektif Ilmu-Ilmu Sosial Di Era Digital: Disrupsi, Emansipasi, Dan Rekognisi*, 140–161.
- Kusmiati, M., & Sakova, M. (2021). RESOLUSI SOSIOLOGIS KONFLIK KEAGAMAAN. CV AKSARA GLOBAL AKADEMIA.
- Marlina, A., & Indrawan, I. (2023). Gaya Penanganan Konflik di SMPN Satu Atap Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 44–58.
- Nurhayati, M. (2023). Komunikasi Politik dan Peran Media dalam Pemilihan Umum. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 1(2), 217–222.
- Primayana, K. H., & Dewi, P. Y. A. (2021). Manajemen Pendidikan Dalam Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital. *Tampung Penyang*, 19(1), 45–59.
- Samuel, S., & Tumonglo, E. E. (2023). Toleransi: Peran Tokoh Agama Sebagai Perekat Kerukunan Umat Beragama. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 81–91.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Identitas Nasional melalui Misi Bendera Merah Putih, dan bahasa Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 284–296.
- Sopiyan, W., Hidayat, R. H., Setiawati, R., & Hadi, F. N. (2022). Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Beragama Sebagai Mediasi Konflik Sosial. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 20(02), 235–250.
- Taniredja, T., Pradana, D. W., & Priyanto, E. (2021). Hubungan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan sikap toleransi peserta didik. *Jurnal Citizenship*, 4(1), 18–25.
- Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/20/10224971/kemenag-alihkan-kuota-tambahan-haji-reguler-untuk-haji-plus-timwas-haji-dpr>.
- Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Timwas DPR Nilai Kemenag <https://nasional.tempo.co/read/1881940/soal-pembagian-kuota-haji-tambahan-timwas-dpr-nilai-kemenag-terindikasi-langgar-undang-undang>.
- Timwas Haji DPR Kritik Keras Kemenag Pengalihan Kuota Haji Tambahan <https://mediaindonesia.com/humaniora/678669/timwas-haji-dpr-kritik-keras-kemenag-pengalihan-kuota-haji-tambahan-langgar-aturan>.

Analisis Dampak Framing Berita Konflik Antara Kementerian Agama dan DPR-RI Mengenai Tambahan Quota Haji 2024

Anggota Timwas Haji DPR Sebut Pengalihan Quota 10 Ribu untuk ONH Plus
<https://nasional.tempo.co/read/1881025/anggota-timwas-haji-dpr-sebut-pengalihan-kuota-10-ribu-untuk-onh-plus-tak-sesuai-keppres>.

Kecewa Quota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, DPR: Desas
<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/20/16544541/kecewa-kuota-tambahan-haji-reguler-dialihkan-ke-haji-plus-dpr-desas-desusnya>.

Timwas Haji Soroti Dugaan Penyimpangan Alokasi Quota Tambahan Haji 2024.
<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/221145-timwas-haji-soroti-dugaan-penyimpangan-alokasi-kuota-tambahan-haji-2024>.

Copyright holder:

Budiman S Pirmansyah (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

